



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH RI
(BIDANG PERINDUSTRIAN, UMKM, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA, DAN
SARANA PUBLIKASI)**

Rapat Ke : 17
Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Sidang : V
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi VII DPR RI
Hari, Tanggal : Kamis, 11 Juni 2026
Pukul : 10.00 – 13.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Ir. Lamhot Sinaga (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PG)
Sekretaris Rapat : Eguh Setiawan., S.IP. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara : 1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP-K/L) Tahun Anggaran 2027; dan
2. Lain-lain.
Hadir : Anggota Komisi VII DPR-RI:
25 orang dari 39 Anggota Komisi VII DPR-RI/8 Fraksi.
Hadir Pemerintah:
1. Menteri UMKM RI (Bapak Maman Abdurrahman); dan
2. Wakil Menteri UMKM RI (Bapak Helvi Yuni Moraza) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM RI, pada pukul 10.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Kamis, 11 Juni 2026, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir. Lamhot Sinaga (F.PG).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI mengenai:
 - a. Pagu indikatif Kementerian UMKM RI TA 2027 sebesar Rp459.134.479.000,- (*empat ratus lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) guna mendukung program pemerintah di bidang pengembangan UMKM.
 - b. Program Kerja Prioritas Nasional Kementerian UMKM RI TA 2027 antara lain pelaksanaan program Pro-Kesra Produktif untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja sampai tahun 2029, yang meliputi: (1) integrasi dan standardisasi program pemberdayaan ekonomi; (2) peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pendampingan; (3) peningkatan keterampilan kerja; (4) akses modal, pasar, kemitraan dan sumber daya produktif; (5) sertifikasi usaha produk; dan (6) pembiayaan inovatif.
2. Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM RI TA 2027 sebesar Rp1.522.622.094.000,- (*satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah*) dan mendesak Kementerian UMKM RI agar membicarakannya dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk merealisasikannya.
3. Kementerian UMKM RI wajib menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, antara lain:
 - a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program digitalisasi pengembangan UMKM.
 - b. Mengintegrasikan pelaksanaan program Pro-Kesra Produktif UMKM dengan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu program prioritas Pemerintah.
 - c. Memprioritaskan program untuk mendukung keberlangsungan usaha bagi UMKM terdampak bencana dan UMKM rentan dari tekanan ekonomi global.
 - d. Meningkatkan alokasi anggaran untuk memfasilitasi UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal.
 - e. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya penambahan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat luas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **13.00** WIB.

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
WAKIL KETUA,**

TTD

Ir. LAMHOT SINAGA

**MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) RI,**

TTD

MAMAN ABDURRAHMAN